



**PENETAPAN**

**Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Ngw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Agama Islam, bertempat tinggal di  
KABUPATEN NGAWI sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dengan surat permohonan tanggal 09 Agustus 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Ngw, pada tanggal 09 Agustus 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Pewaris atas nama ALI SISWANTO bin SAMIYUN, menikah dengan seorang wanita bernama WINARTI binti PARMIN dan merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah sah pada tanggal 25 Juni 2011 dengan Akta Nikah nomor 131/29/VI/2011 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa pernikahan Pewaris dengan suaminya tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama:

Halaman 1 dari 18 Halaman.

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Ngw



ALVIRA ELY WIDYAWATI binti ALI SISWANTO, Perempuan usia 11 tahun 3 bulan Lahir di Ngawi 24-03-2012

3. Bahwa pada hari Selasa, 01 Agustus 2011 Pewaris yang bernama ALI SISWANTO bin SAMIYUN telah meninggal dunia seperti yang tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor:474.3/62/404.301.09/2020 tertanggal 4 Juni 2020;

4. Bahwa setelah ALI SISWANTO bin SAMIYUN meninggal, anak Pemohon yang bernama ALVIRA ELY WIDYAWATI binti ALI SISWANTO, Perempuan usia 11 tahun 3 bulan diasuh oleh Pemohon sebagai anak kandung sampai sekarang;

5. Bahwa, selama hidup suami Pemohon meninggalkan sejumlah harta, sebagai berikut :

1) Sebidang tanah non pertanian, dengan luas 189m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Beran, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Sertipikat hak milik No. 05804, Atas nama pemegang hak: Sobirin, ALVIRA ELY WIDYAWATI binti ALI SISWANTO, dengan batas Utara: Jl. Baiturohman, Timur: tanah ke 2 (sertipikat No.05805), Selatan:Gang Merpati, Barat: Gang Merpati, tertanggal 06 Juli 2023

2) Sebidang tanah non pertanian, dengan luas 248m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Beran, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Sertipikat hak milik No. 05805, Atas nama pemegang hak: Sobirin, ALVIRA ELY WIDYAWATI binti ALI SISWANTO, dengan batas Utara: Jl. Baiturohman, Timur: Tanah Sumadi, Selatan:Gang Merpati, Barat: Gang Merpati, tertanggal 06 Juli 2023

6. Bahwa, Pemohon hendak mengurus administrasi di Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) xxxxxxxxxx xxxxx, untuk dua bidang tanah :

Halaman 2 dari 18 Halaman.

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Sebidang tanah non pertanian, dengan luas 189m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Beran, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Sertipikat hak milik No. 05804, Atas nama pemegang hak: Sobirin, ALVIRA ELY WIDYAWATI binti ALI SISWANTO, dengan batas Utara: Jl. Baiturohman, Timur: tanah ke 2 (sertipikat No.05805), Selatan: Gang Merpati, Barat: Gang Merpati, tertanggal 06 Juli 2023

2) Sebidang tanah non pertanian, dengan luas 248m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Beran, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Sertipikat hak milik No. 05805, Atas nama pemegang hak: Sobirin, ALVIRA ELY WIDYAWATI binti ALI SISWANTO, dengan batas Utara: Jl. Baiturohman, Timur: Tanah Sumadi, Selatan: Gang Merpati, Barat: Gang Merpati, tertanggal 06 Juli 2023

7. Bahwa, oleh karena anak Pemohon yang bernama ALVIRA ELY WIDYAWATI BINTI ALI SISWANTO tersebut masih di bawah umur, maka dalam proses administrasi untuk 2 (dua) bidang tanah tersebut mensyaratkan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama;

8. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama ALVIRA ELY WIDYAWATI BINTI ALI SISWANTO, dan berhak mewakili untuk melakukan kegiatan administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas dua bidang tanah yang tersebut di atas;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngawi c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Halaman 3 dari 18 Halaman.

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (WINARTI binti PARMIN) sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama ALVIRA ELY WIDYAWATI BINTI ALI SISWANTO, Perempuan usia 11 tahun 3 bulan Lahir di Ngawi 24-03-2012;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Ngawi, Pemohon telah hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon secukupnya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon terhadap pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan tambahan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Alvira Ely Widyawati Binti Ali Siswanto, Perempuan, yang lahir pada tanggal 24 Maret 2012, dikategorikan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa dan belum dapat menghadap untuk menandatangani akta yang diperlukan di depan Notaris untuk mengurus administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) /balik nama Sertifikat Hak Milik dimana ahli warisnya kurang umur;
- Bahwa, Pemohon hendak melakukan kegiatan mengurus administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas dua bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik :

Halaman 4 dari 18 Halaman.

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) Nomor 05804 atas nama Sobirin, Alvira Ely Widyawati Binti Ali Siswanto, yang terletak di Desa Beran, Kecamatan Ngawi, xxxxxxxx xxxxx, dengan luas 189 m2 (seratus delapan puluh sembilan meter persegi);

b) Nomor 05805 atas nama Sobirin, Alvira Ely Widyawati Binti Ali Siswanto, yang terletak di Desa Beran, Kecamatan Ngawi, xxxxxxxx xxxxx, dengan luas 248 m2 (dua ratus empat puluh delapan meter persegi);

Bahwa telah hadir pula dan telah didengar anak Pemohon bernama: Alvira Ely Widyawati, Perempuan lahir pada 24 Maret 2012, tempat tinggal KABUPATEN NGAWI dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon selama ini tinggal bersama Pemohon dalam keadaan baik dan merasa nyaman;
- Bahwa ia mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Perwalian dalam rangka untuk mengurus administrasi di kantor Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxx untuk dua bidang tanah ;
- Bahwa ia setuju dan tidak keberatan atas kehendak Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3521166303860002 tanggal 18 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

*Halaman 5 dari 18 Halaman.*

*Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Ngw*



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 131/29/VI/2011 tanggal 25 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ali Siswanto Nomor: 474.3/62/404.301.09/2020 tanggal 04 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Beran kecamatan Ngawi xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor: 3521-LT-07062012-0023 tanggal 07 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Warisan tanggal 27 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Desa Beran xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 05804 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-

Halaman 6 dari 18 Halaman.

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Ngw





nazagelen, kemudian diberi kode (P.6). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 05805 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.7). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Bukti Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, bahwa saksi adalah Tetangga Almarhum Suami Pemohon Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Almarhum Suami Pemohon;
- Bahwa saksi melihat pekerjaan Pemohon adalah sebagai xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi melihat Pemohon sudah menikah dengan Ali Siswanto bin Samiyun dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Alvira Ely Widyawati, Perempuan, yang lahir pada tanggal 24 Maret 2012;
- Bahwa saksi melihat Suami Pemohon telah meninggal dunia pada 01 Agustus 2011 karena sakit;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon sampai sekarang ikut bersama dan berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi melihat selama ikut dengan Pemohon anak yang bernama Alvira Ely Widyawati tersebut dalam keadaan sehat wal afiat dan terpenuhi seluruh kebutuhan hidup dan pendidikannya;

Halaman 7 dari 18 Halaman.

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut untuk mengurus administrasi di kantor Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxx untuk dua bidang tanah dimana ahli warisnya kurang umur;
- Bahwa saksi melihat Pemohon muslim yang baik, jujur, adil, berfikiran sehat, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan juga tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa semasa hidup hingga meninggalnya, Suami Pemohon (Ali Siswanto bin Samiyun) tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi melihat selama ini tidak ada orang yang keberatan jika Pemohon diangkat menjadi wali dari anak tersebut;

2. **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, bahwa saksi adalah Tetangga Almarhum Suami Pemohon Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Almarhum karena saksi adalah Tetangga Almarhum Suami Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Ali Siswanto bin Samiyun adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi melihat Pemohon sudah menikah dengan Ali Siswanto bin Samiyun dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Alvira Ely Widyawati;
- Bahwa saksi melihat Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada 01 Agustus 2011 karena sakit;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon selama ikut dan diasuh Pemohon setelah Suami Pemohon meninggal dunia dalam keadaan baik-baik saja dan selalu terpenuhi kebutuhannya;

Halaman 8 dari 18 Halaman.

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi melihat Pemohon muslim yang baik, jujur, adil, berfikiran sehat, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan juga tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa semasa hidup hingga meninggalnya, Suami Pemohon (Ali Siswanto bin Samiyun) tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud memohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya, untuk mengurus administrasi di kantor Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxx untuk dua bidang tanah dimana ahli warisnya kurang umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang keberatan jika Pemohon diangkat menjadi wali dari anak tersebut

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian permohonan Pemohon, pokok perkara *a quo* adalah permohonan Penetapan Perwalian terhadap anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana maksud Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan oleh karena Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

*Halaman 9 dari 18 Halaman.*

*Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Ngw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxx, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Ngawi secara relative berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar Pemohon sebagai Ibu kandung meminta untuk ditetapkan sebagai wali (Perwalian) atas anak kandungnya yang bernama Alvira Ely Widyawati, Perempuan, yang lahir pada tanggal 24 Maret 2012, saat ini masih dibawah umur atau belum dewasa menurut hukum dan belum menikah karena Ayahnya telah meninggal dunia dengan alasan untuk mengurus administrasi di kantor Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxxxx xxxxx dari suami Pemohon dimana ahli warisnya kurang umur, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas personalitas keislaman dan sesuai penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk wewenang dan tugas Pengadilan Agama Ngawi;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara volunter, maka kepada Pemohon dibebani bukti, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR.;

Halaman 10 dari 18 Halaman.

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan dengan bukti-bukti surat P.1, s/d P.7. dan 2 (dua) saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang selanjutnya dipertimbangkan secara formil dan materiil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa seluruh bukti surat Pemohon, kecuali P.5 ternyata merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR serta Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata. Oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti surat Pemohon (P.7) adalah surat biasa yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangannya masing-masing secara terpisah dan di bawah sumpahnya masing-masing ternyata kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur oleh Pasal 144,145,146 dan 147 HIR., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pokok meteri keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan erat pokok perkara dan dapat diterima untuk digunakan dalam memutus perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Halaman.

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon (Winarti binti Parmin) dan Ali Siswanto bin Samiyun adalah pasangan suami-isteri yang menikah secara sah;

-----Bahwa dari pernikahan tersebut, dilakurina seorang anak bernama Alvira Ely Widyawati, Perempuan, yang lahir pada tanggal 24 Maret 2012;

--Bahwa Suami Pemohon yang bernama Ali Siswanto bin Samiyun telah meninggal dunia pada 01 Agustus 2011 karena sakit;

-----Bahwa sejak Suami Pemohon (Ali Siswanto bin Samiyun) meninggal dunia, dan anak Pemohon tersebut ikut dan diasuh oleh Pemohon sampai sekarang;

----Bahwa Pemohon adalah muslim yang baik, jujur, adil, berfikiran sehat, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan juga tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya tersebut;

-----Bahwa anak Pemohon dari almarhum suaminya bernama Alvira Ely Widyawati, Perempuan, yang lahir pada tanggal 24 Maret 2012 yang diasuh Pemohon tersebut sampai saat ini dalam keadaan baik;

-----Bahwa Pemohon bermaksud ditetapkan menjadi wali bagi anaknya bernama Alvira Ely Widyawati, Perempuan, yang lahir pada tanggal 24 Maret 2012;

-----Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap anaknya tersebut, karena untuk mengurus administrasi di kantor Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxx dimana ahli warisnya kurang umur;

-Bahwa saksi tahu penjualan tanah tersebut adalah untuk kebutuhan dari anak Pemohon dan almarhum Suami Pemohon tersebut;

-----Bahwa selama itu tidak ada pihak yang merasa keberatan atas keberadaan anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

Halaman 12 dari 18 Halaman.

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan yang disampaikan para saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri masing-masing, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai secara materiil kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti Pemohon yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (**Winarti binti Parmin**) dan Ali Siswanto bin Samiyun adalah suami-isteri yang telah dilakurina seorang anak bernama Alvira Ely Widyawati, Perempuan, yang lahir pada tanggal 24 Maret 2012;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah seorang xxxxxxxxxx;
- Bahwa anak kandung Pemohon bernama Alvira Ely Widyawati, Perempuan, yang lahir pada tanggal 24 Maret 2012 saat ini belum dewasa dan belum menikah.
- Bahwa sejak ayahnya meninggal dunia, anak yang bernama Alvira Ely Widyawati, Perempuan, yang lahir pada tanggal 24 Maret 2012 tersebut sampai sekarang ikut dan diasuh oleh Pemohon dengan cara yang baik dan selama itu tidak ada pihak yang merasa keberatan atas keberadaan anak tersebut dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah muslim yang baik, jujur, adil, berfikiran sehat, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan juga tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya tersebut.
- Bahwa alasan Pemohon meminta ditetapkan menjadi wali bagi anaknya yang bernama Alvira Ely Widyawati, Perempuan, yang lahir pada tanggal 24 Maret 2012 adalah untuk mengurus administrasi di kantor Badan

Halaman 13 dari 18 Halaman.

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional xxxxxxxxxx xxxxx dimana ahli warisnya kurang umur.

---Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab, jujur dan penuh kasih sayang kepada anaknya tersebut dan tidak mempunyai perilaku yang tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan mengenai penetapan seseorang menjadi wali (Perwalian) diatur dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam yang menggariskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Dengan demikian Pemohon sebagai Ibu kandung dari anaknya yang bernama Alvira Ely Widyawati, Perempuan, yang lahir pada tanggal 24 Maret 2012 tersebut pada dasarnya dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan anak-anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang mengatur demikian, akan tetapi ternyata untuk mengurus administrasi di kantor Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxxxx xxxxx dimana ahli warisnya kurang umur kepada pihak lain, Pemohon masih memerlukan penetapan perwalian anak dari Pengadilan dan izin dari Pengadilan sebagaimana maksud Pasal 309 dan Pasal 393 KUH Perdata. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdapat alasan dan kepentingan hukum bagi Pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai wali dari Alvira Ely Widyawati, Perempuan,

Halaman 14 dari 18 Halaman.

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir pada tanggal 24 Maret 2012, dan sekaligus izin bertindak mewakili kepentingan anaknya tersebut untuk mengurus administrasi di kantor Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxxxx xxxxx dimana ahli warisnya kurang umur yang disebabkan anak Pemohon tersebut masih di bawah umur (belum dewasa) dan belum menikah Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil apakah anak Pemohon tersebut benar-benar tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga diperlukan penetapan Perwalian dan begitu juga dengan Pemohon apakah layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Wali dari anak tersebut untuk bertindak dan mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimana telah ternayata anak kandung dari Pemohon yang bernama Alvira Ely Widyawati, Perempuan, yang lahir pada tanggal 24 Maret 2012 saat ini memang belum dewasa (belum berumur 21 tahun), belum menikah sehingga anak tersebut dinilai tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimana anak kandung dari Pemohon yang bernama Alvira Ely Widyawati, Perempuan, yang lahir pada tanggal 24 Maret 2012 sejak Ayah kandungnya yang bernama Ali Siswanto bin Samiyun meninggal dunia sampai sekarang tetap tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya dengan baik serta dikaitkan dengan fakta dimana Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab, jujur dan penuh kasih sayang kepada anaknya tersebut dan tidak mempunyai perilaku yang tercela, maka berdasarkan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat Pemohon dipandang cakap dan layak untuk ditetapkan sebagai wali guna mewakili anaknya

Halaman 15 dari 18 Halaman.

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan menjadi wali dari anaknya yang bernama Alvira Ely Widyawati, Perempuan, yang lahir pada tanggal 24 Maret 2012, guna bertindak mewakili kepentingan anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang secara spesifik dalam hal ini adalah untuk mengurus administrasi di kantor Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxxxx xxxxx dimana ahli warisnya kurang umur patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Perwalian Pemohon atas anak kandung dari Pemohon yang bernama Alvira Ely Widyawati, Perempuan, yang lahir pada tanggal 24 Maret 2012 tersebut lebih lanjut Majelis Hakim memandang perlu mengingatkan Pemohon terkait dengan akibat hukum dari adanya penetapan perwalian ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perwalian dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perwalian pada anak pada dasarnya adalah mengenai pribadi anak dan juga mengenai harta bendanya. Oleh karena itu Pemohon yang telah ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut selain berkewajiban untuk menjaga, melindungi, memenuhi segala kebutuhan dari pribadi anak tersebut, baik pemenuhan kebutuhan sehari-hari dalam hal keberlangsungan hidup-kehidupan dan kesehatan maupun pendidikannya juga berkewajiban untuk menjaga harta yang dimiliki anak tersebut, baik harta yang diperolehnya secara pribadi maupun dari warisan almarhum Ibu Kandungnya;

Halaman 16 dari 18 Halaman.

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Winarti Binti Parmin**) sebagai Wali dari anak yang bernama **Alvira Ely Widyawati**, Perempuan, yang lahir pada tanggal 24 Maret 2012;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan Penetapan ini pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Chairul Anwar, M.H. dan Drs. H. Shobirin, M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hanim Makhsusiati, S.H. sebagai Panitera Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera serta Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Chairul Anwar, M.H.

Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 Halaman.

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Ngw



ttd

Drs. H. Shobirin, M.H.

Panitera

ttd

Hanim Makhsusiati, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNPB	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp. 10.000,-
c. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. <b>330.000,-</b>

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman.

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Ngw